



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : STAF AHLI
SUB UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHAMMAD SABANI**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG SUMBER DAYA ALAM, PEREKONOMIAN DAERAH, DAN KESEJAHTRAAN RAKYAT**
3. NHK : **68636**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.110.571.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 279 m²/108 m² di KOTA SAMARINDA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.400.000.000
2. Tanah Seluas 180 m² di KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 281.592.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 537 m²/537 m² di KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 130.491.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 18360 m²/18360 m² di KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 31.671.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/38 m² di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 516.817.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m²/70 m² di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
7. Tanah Seluas 361 m² di KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 148.500.000

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH RUSH 1,5 G/MINI BUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 46.200.750



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	512.980.876
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.818.252.626
III. HUTANG	Rp.	373.626.965
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.444.625.661

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **26 Juni 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.